

## **PARTISIPASI POLITIK WARIA DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017**

**Septian Tri Baskoro Adi (14010115130097)**

**Email : [Baskoroadi094@gmail.com](mailto:Baskoroadi094@gmail.com)**

**Dosen Pembimbing : Dr. Dewi Erowati, S.Sos, M.Si**

**Email : [dewierowati@yahoo.com](mailto:dewierowati@yahoo.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

### **ABSTRAKSI**

Pesta demokrasi bernama Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada menjadi bentuk kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerah, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2017. Pilkada DKI Jakarta 2017 tak hanya diikuti oleh kelompok mayoritas tapi juga minoritas, salah satunya adalah wanita-pria atau biasa disebut waria. Jumlah waria yang hanya berada diangka ribuan membuat kelompok ini menjadi minoritas dalam pesta demokrasi serta rentan terhadap diskriminasi yang ada. Tingkat partisipasi kelompok waria menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan jumlahnya yang besar serta kemajemukan masyarakat DKI Jakarta serta politik DKI Jakarta yang menjadi barometer demokrasi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mixed method* guna menggabungkan data kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif dan menggunakan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson.

Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan berbagai macam bentuk partisipasi politik kelompok waria pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menurut teori partisipasi politik Huntington dan Nelson. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi politik kelompok waria yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

*Kata Kunci* : pilkada, partisipasi, Politik, waria

# **POLITICAL PARTICIPATION OF TRANSGENDER IN THE JAKARTA ELECTION 2017**

**Septian Tri Baskoro Adi**  
[Baskoroadi094@gmail.com](mailto:Baskoroadi094@gmail.com)

**Supervisor : Dr. Dewi Erowati, S.Sos, M.Si**  
**Email : [dewierowati@yahoo.com](mailto:dewierowati@yahoo.com)**

**Department of Politics and Government FISIP Undip Semarang**

## **ABSTRACT**

The democratic party called *Pemilihan Kepala Daerah* or *Pilkada* is a form of popular sovereignty to elect leaders in the region, DKI Jakarta Province is one of the regions that held the simultaneous Regional Election in 2017. The DKI Jakarta Election 2017 is not only followed by majority but also minorities, one of them is *wanita-pria* or commonly called *waria*. The number of transvestites who are only in the thousands makes this group a minority in the democratic party and vulnerable to existing discrimination. The level of participation of transgender groups is interesting to study because of the large number and plurality of the people of DKI Jakarta as well as the politics of DKI Jakarta which has become a barometer of democracy in Indonesia. This study uses a mixed method research method to combine descriptive and quantitative descriptive qualitative data and use Huntington and Nelson's political participation theory.

The results of this study are to describe various forms of political participation of transgender groups in the DKI Jakarta Pilkada in 2017 according to Huntington and Nelson's political participation theory. The conclusion of this study shows the low level of political participation of transgender groups which are influenced by internal and external factors.

*Keywords:* Local election, Participation, Politics, Transgender

*Keywords:* Local election, Participation, Politics, Transgender

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sejak awal berdirinya, memilih menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Rakyat menjadi pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara yang didiaminya. Salah satu cara untuk melaksanakan dan mendukung sistem politik yang demokratis adalah dengan pemilihan umum (pemilu). Pemilu digunakan untuk penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung. Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah membuat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang pelaksanaannya secara bersama-sama di sebagian daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis dalam periode yang sama. Salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak adalah DKI Jakarta pada tahun 2017.

Di Indonesia yang memiliki ragam etnis, suku dan ras maupun bahasa daerah. Kelompok minoritas memiliki tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi khususnya di Indonesia. Status minoritas biasanya diberikan kepada kelompok kecil di masyarakat yang memiliki perbedaan mencolok dengan kelompok yang lebih besar. Salah satu kelompok minoritas itu adalah kelompok *Lesbian, Gay, Bisex, Transgender* (LGBT). Dewasa ini, kata-kata LGBT sangatlah sering kita dengar dalam media *mainstream* ataupun pembahasan yang ada di masyarakat. LGBT adalah kepada kelompok yang memiliki orientasi seksual yang non-heterogen. LGBT adalah sekumpulan masyarakat yang mengelompokkan diri atas kesamaan orientasi seksual, biasanya penyuka sesama jenis, dikarenakan LGBT mengalami kesulitan untuk terbuka mengenai *sexual* dan *gender freedom* ditatanan sosial pada umumnya.

Wanita-pria (waria) atau wadam (wanita-adam) adalah salah satu bagian dari LGBT. Waria adalah gender yang hadir setelah laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat yang memiliki ciri fisik pria, tetapi lebih cenderung menampilkan diri sebaliknya yaitu sebagai wanita, baik dalam penampilan maupun perilaku.

Jumlah waria pada tahun 2010, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial menyebutkan bahwa terdapat 31.179 waria di Indonesia<sup>1</sup>. Jumlah ini menurun dari data yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2006 yang memperkirakan bahwa ada 20.960 hingga 35.300 waria di Indonesia dan 3.500 diantaranya menetap di DKI Jakarta<sup>2</sup>. Sumber data lain menyebutkan, jumlah waria di DKI Jakarta yang tercatat di Yayasan Srikandi Sejati hingga November 2010 berjumlah 2.960 orang<sup>3</sup>.

Lahirnya perilaku waria tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang kuat yang berasal dari dirinya, bahwa ada dorongan fisik mereka tidak sesuai dengan psikisnya. Permasalahan waria dianggap tidak hanya sebagai permasalahan moral dan perilaku yang dianggap tidak wajar, tetapi juga permasalahan sosial lainnya yang cenderung secara normatif tidak ada jenis kelamin ketiga antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh kelompok waria yang mendapat perhatian media adalah penutupan Pesantren Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang mencatatkan diri sebagai satu-satunya pesantren khusus untuk kaum transgender di dunia. Pesantren ini didirikan oleh Shinta

---

<sup>1</sup> Chenia Ilma Kirana, Hery Wibowo, & Santoso Tri Raharo, "Proses Pelayanan Sosial Bagi Waria Mantan Pekerja Seks Komersial di Yayasan Srikandi Sejati Jakarta Timur", Pada Jurnal *Prosiding KS Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.3, Juli 2016, Hal. 307.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid. Hal.308.

Ratri yang juga seorang transgender. Selain sebagai lembaga pendidikan, Pesantren Al-Fatah juga berfungsi untuk tempat ibadah dikarenakan kaum transgender selalu mendapatkan kesulitan dan mendapatkan stigma yang jelek bahkan penolakan apabila ingin beribadah di masjid atau mushola. Penutupan Pesantren Al-Fatah ini karena dianggap tidak berizin dan meresahkan warga setempat<sup>4</sup>. Kondisi waria yang mendapatkan diskriminasi dan keadaan Pilkada DKI Jakarta yang penuh dengan dinamika sehingga penulis meneliti tentang Tingkat Partisipasi Politik Kelompok Waria di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mixed method* dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah untuk menjelaskan kasus yang terjadi secara mendalam dan komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kajian pustaka, dan telaah dokumen.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Partisipasi Politik Kelompok Waria

#### A. Kegiatan Pemilihan

Bentuk kegiatan pemilihan yang penulis maksudkan adalah kelompok waria menggunakan hak pilih mereka ketika pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain itu, menjadi timses atau simpatisan dari cagub-cawagub termasuk dalam kegiatan pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,3 % responden tidak menggunakan hak pilih mereka dan 38,7 % responden menggunakan hak pilih mereka. Rendahnya penggunaan hak pilih adalah

<sup>4</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160225\\_indonesia\\_ponpes\\_waria\\_ditutup\\_diakses\\_pada\\_tanggal\\_19\\_November\\_2017\\_pukul\\_20.30](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160225_indonesia_ponpes_waria_ditutup_diakses_pada_tanggal_19_November_2017_pukul_20.30).

dengan alasan kurangnya Cagub-Cawagub untuk mendekati kelompok waria yaitu sebanyak 29 % . Lalu masalah umum kelompok waria adalah mereka tidak terdaftar di DPT karena masalah administratif yaitu seperti KTP, alasan ini menjadi 22,6% kelompok waria tidak menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, kepatisan dari kelompok waria terhadap permasalahan politik menjadi alasan ketiga mengapa kelompok waria tidak menggunakan hak pilihnya, 19,4% responden mengatakan mereka tidak peduli dengan permasalahan politik, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017.

Alasan kedua adalah karena waria karena mereka tidak memiliki KTP. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Ketua Forum Komunikasi Waria Seluruh Indonesia, Mami Yuli.<sup>5</sup>

“Kalau masalah KTP ya memang sebagian besar seperti itu, tidak punya KTP. Tapi bagi teman teman yang punya KTP pasti memilih. Yang sudah punya KTP sekitar 45% dari total 4.000 waria di Jakarta”

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Mantan Ketua Forum Komunikasi Waria Se DKI Jakarta, Bu Nancy<sup>6</sup>.

“Paling 40% yang sudah punya KTP itu. Masalahnya kan nanti berbenturan dengan yuridis seperti perbankan, kesehatan, kami ini bingung. Bahkan lebih lanjut kan nanti ga bisa nyoblos waktu pemilu”

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Mami Yuli, Ketua Forum Komunikasi Waria Seluruh Indonesia, pada hari Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.30.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bu Nancy, Mantan Ketua Forum Komunikasi Waria se DKI Jakarta, pada hari Rabu, 23 Januari 2019 pukul 11.00.

Dari segi kampanye, partisipasi politik kelompok waria menunjukkan bahwa berdasarkan tabel 3.16 74,2% responden tidak mengikuti bentuk kampanye apapun, baik hanya menyaksikan atau menjadi panitia kampanye tersebut. Sedangkan 22,6% responden menyatakan mereka pernah menyaksikan kampanye dari paslon Cagub-Cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2017. Hanya 3,2% responden yang menyatakan bahwa ia membantu kampanye tersebut. Membantu yang dimaksud adalah dengan cara mengikuti kegiatan kampanye tersebut dan membantu membagikan alat kampanye seperti brosur, kaos maupun *leaflet* dari paslon Cagub.

## B. Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi adalah kegiatan kelompok waria yang bersatu dan berhimpun pada satu organisasi yang memiliki kesamaan visi dan misi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 79% responden tidak mengikuti kegiatan organisasi apapun, baik itu kelompok kepentingan maupun partai politik. 21% responden menyatakan dirinya adalah bagian dari sebuah organisasi. Organisasi yang diikuti responden salah satunya adalah LSM Yayasan Srikandi Sejati (YSS). YSS memang mempunyai kebijakan dimana 80% pekerjanya adalah berasal dari komunitas waria itu sendiri. Seluruh responden tidak ada yang terdaftar menjadi kader dari salah satu partai politik sehingga organisasi yang diikuti oleh kelompok waria adalah LSM yang memiliki fokus kepada advokasi kelompok rentan atau LSM yang fokus kepada kesehatan dan kesejahteraan kelompok rentan.

## C. Lobby

Dalam melakukan *lobby*, kelompok waria lebih diwakilkan oleh orang yang

memiliki kekuasaan dan posisi lebih tinggi seperti ketua forum atau ketua LSM yang ada. Tetapi itu tidak berlangsung di Forum Komunikasi Waria Se DKI, seperti yang dikatakan Bu Lenny.<sup>7</sup>

“Saya rasa kalah sejauh itu (melakukan *lobby*), tidak. Karena tugas dari ketua forum hanya mengayomi dan bias menjadi *contact person* apabila ada waria bermasalah dengan keluarganya mungkin.”

Hal ini dalam hal politis memang kurang berlangsung kegiatan *lobbying*. Tetapi untuk masalah kesehatan, LSM YSS sudah bekerja sama baik dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu, untuk menyampaikan aspirasinya dan membawa kepentingan kelompok waria dalam Pilkada DKI Jakarta, kelompok waria yang diwakili oleh pemimpin kelompok lebih mengikuti gerakan yang lebih stabil dan telah besar, seperti kelompok buruh yang sudah memiliki serikat buruh yang cenderung lebih kuat dan lebih memiliki nilai posisi tukar lebih baik dari kelompok waria.

## D. Contacting

*Contacting* atau yang selanjutnya disebut menghubungi politisi atau pejabat publik dilakukan oleh kelompok waria, tapi sama halnya dengan *lobbying*, hanya dilakukan oleh pemimpin dari kelompok waria. Beberapa responden menyebutkan kenapa mereka tidak berusaha menghubungi politisi atau pejabat publik yang memiliki fokus pada kelompok rentan karena mereka tidak memiliki kontak dari politisi atau pejabat public tersebut. Selain itu, responden penulis

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lenny, Ketua Yayasan Srikandi Sejati, pada hari Kamis, 24 Januari 2019 pukul 14.00.

juga menyebutkan alasan tidak melakukan *contacting* karena responden berpikiran bahwa hal itu sudah diwakilkan oleh pimpinan kelompok atau organisasi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Mami Yuli pada wawancara dengan penulis.<sup>8</sup>

“Mereka (timses dan paslon) yang mendatangi kami (kelompok waria), tapi biasanya perwakilan seperti dari timses mereka”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam partisipasi politik berupa *contacting*, kelompok waria cenderung lebih pasif. Kelompok waria lebih banyak didatangi oleh perwakilan timses paslon. Walaupun perwakilan timses ini hanya mendatangi pimpinan dari kelompok waria tersebut.

#### **E. Tindakan Kekerasan (*Violance*)**

*Violance* dalam partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dapat berupa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok. Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden tidak pernah mengikuti atau menyuarakan aspirasi kelompok waria melalui kegiatan demonstrasi. Delapan belas responden (29%) pernah mengikuti demonstrasi guna menyuarakan aspirasi kelompok waria sedangkan 44 responden (71%) tidak pernah mengikuti kegiatan demonstrasi. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017, beberapa responden pernah mengikuti demonstrasi yang dilakukan saat Ahok sedang menjalani proses persidangan. Beberapa responden mengikuti demonstrasi ini karena responden tersebut merasa bahwa Ahok adalah kanal yang tepat untuk membawa aspirasi kelompok rentan

termasuk kelompok waria sehingga responden merasa perlu untuk membela Ahok. Diluar konteks Pilkada DKI Jakarta, mayoritas responden yang mengikuti kegiatan demonstrasi adalah demonstrasi penolakan RKUHP yang didalamnya terdapat pasal yang dapat mengkriminalkan kelompok LGBT pada umumnya dan kelompok waria pada khususnya.

Beberapa faktor menjadi alasan mengapa kegiatan demonstrasi tidak dilakukan oleh kelompok waria. *Pertama*, adalah kekuatan dari komunitas waria dan LGBT tidak terlalu besar dan belum memiliki *bargaining position* yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan kelompok ini lebih memilih bergabung bersama kelompok yang lebih memiliki kekuatan seperti serikat buruh. *Kedua*, mudahnya penolakan dari masyarakat. Kelompok waria dan komunitas LGBT sangat jarang melakukan demonstrasi secara terang terangan. Biasanya, mereka melakukan demonstrasi saat Hari HIV/AIDS, Hari Wanita, ataupun saat Hari Buruh. Hal ini karena apabila komunitas ini melakukan demonstrasi secara terang terangan, maka akan muncul penolakan yang memungkinkan bahkan terjadi tindak kekerasan yang menyerang kelompok waria dan komunitas LGBT. Sehingga kelompok ini lebih memilih untuk bergerak dalam “bayangan” gerakan lain. *Ketiga*, rendahnya kepedulian waria terhadap kelompoknya sendiri. Dalam diri mereka, sebenarnya sudah sadar akan kondisi dari komunitasnya, tetapi waria lebih memilih untuk pasrah karena takut dan tidak tahu melakukan apa dan menghubungi siapa.

#### **2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Kelompok Waria di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017**

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Mami Yuli, Ketua Forum Komunikasi Waria Seluruh Indonesia, pada hari Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.30.

## A. Faktor Internal

### 1. Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendidikan mempengaruhi *voter turnout* saat pemilihan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada tabel 3.29 menunjukkan peningkatan penggunaan hak pilih yang diikuti oleh makin tingginya tingkat pendidikan responden. Responden dengan tingkat pendidikan rendah berjumlah 22 responden. Dari jumlah tersebut, hanya 4 responden yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 18 responden lainnya tidak menggunakan hak pilih mereka. Pada tingkat pendidikan menengah yaitu tamat SMP dan SMA jumlah responden berjumlah 38 responden. Dua puluh responden menggunakan hak pilihnya sedangkan 18 responden lainnya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden mempengaruhi kepedulian responden dalam menggunakan hak pilihnya. Mami Yuli dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa<sup>9</sup>.

“Karena pendidikan dapat merubah cara pandang seseorang juga. Sehingga dengan pendidikan juga, kelompok waria dapat lebih berdaya dan mungkin saja dapat berpartisipasi lebih dalam politik.”

Pendidikan dapat meningkatkan *voter turnout* kelompok waria dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tetapi dalam partisipasi politik lainnya, penulis

merasa pendidikan bukan menjadi faktor utama. Dalam partisipasi politik berupa kegiatan organisasi pada tabel 3.30 menunjukkan bahwa hanya 13 responden yang mengikuti kegiatan organisasi seperti LSM ataupun Partai Politik. Dari tingkat pendidikan rendah hanya 4 responden, tingkat pendidikan menengah sebanyak 7 responden dan tingkat pendidikan tinggi berjumlah 2 responden. Responden lebih banyak tidak mengikuti kegiatan organisasi sebanyak 49 responden dimana 2 responden adalah tidak tamat SD, 16 responden tamatan SD, 24 responden adalah tamatan SMP dan 7 responden adalah tamatan SMA. Dalam kegiatan organisasi ini, faktor pendidikan bukan menjadi faktor utama seorang waria mengikuti sebuah organisasi.

### 2. Tingkat Kehidupan Ekonomi

Tingkat pendapatan tidak mempengaruhi waria dalam berpartisipasi politik. Hal ini dapat dilihat dari semakin tinggi pendapatan kelompok waria, ternyata tidak berjalan searah dengan partisipasi politik mereka. Dari 60 responden dengan tingkat penghasilan menengah menunjukkan hanya 24 responden (40%) yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan ada 26 responden (60%) tidak menggunakan hak pilihnya. Yang menarik adalah responden dengan tingkat ekonomi rendah yaitu 2 responden (100%) malah aktif menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan responden tersebut merasa perlu untuk menggunakan hak pilihnya agar kepentingan kelompok waria dapat tersampaikan. Fenomena ini juga

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Mami Yuli, Ketua Forum Komunikasi Waria Seluruh Indonesia, pada hari Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.30.

terjadi dalam partisipasi politik kelompok waria berupa kegiatan demonstrasi.

### 3. Kesadaran Politik

Pada tabel 3.7 mengenai responden mendiskusikan yang menyangkut tentang Pilkada DKI, data menunjukkan bahwa hanya 26 responden (41,9%) yang pernah mendiskusikan isu pilkada sedangkan sisanya yaitu 36 responden (58,1%). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok waria, lebih memilih untuk tidak mendiskusikan isu pilkada dengan orang lain. Terdapat beberapa alasan mengapa waria tidak memperbincangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. *Yang pertama*, mereka menganggap bahwa isu pilkada adalah isu personal pribadi masing masing sehingga karena itu, mereka tidak mau mendiskusikan soal isu pilkada ini. Politik atau pilihan politik lebih menjadi pilihan pribadi yang tidak mau dibahas secara publik oleh kelompok waria. *Yang kedua*, kelompok waria mnganggap bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat riskan untuk dibahas, sehingga kelompok waria memilih jalan untuk berhati hati untuk mendiskusikannya. Banyaknya pemberitaan tentang isu SARA membuat kelompok waria lebih memilih diam.

## B. Faktor Eksternal

### 1. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam mendorong partisipasi politik kelompok waria tidak atau kurang berpengaruh terhadap partisipasi politik kelompok waria pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan ada 6

responden (9,7%) yang menggunakan baliho atau spanduk sebagai media mengikuti perkembangan politik. Baliho atau spanduk tersebut termasuk yang dibuat oleh KPU Provinsi DKI Jakarta berupa alat peraga kampanye. Selain itu, 27 responden (43,5%) menggunakan iklan di TV sebagai media mengikuti perkembangan politik, yang didalamnya termasuk himbuan menggunakan hak pilihnya maupun iklan kampanye dari masing masing paslon. Hal ini, tidak meningkatkan partisipasi politik kelompok waria dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Empat belas responden (22,6%) tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini menyangkut dengan aturan yang dibuat mengenai pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan tinggi-rendahnya partisipasi politik kelompok waria saat pemilihan umum. Selama ini, pendataan yang dilakukan oleh petugas kepada kelompok waria banyak menemui kesulitan akibat petugas kurang memahami kondisi kelompok waria. Dalam hal ini, pemerintah sudah berusaha mendekati kelompok waria melalui Dinas Sosial dan Disduk Capil DKI Jakarta guna memfasilitasi pembuatan ktp seperti yang diungkap oleh Bu Lenny kepada penulis<sup>10</sup>.

“Kami pernah mengadakan kegiatan bersama dengan Dinas Sosial dan Disduk Capil DKI Jakarta, untuk bisa memfasilitasi

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lenny, Ketua Yayasan Srikandi Sejati, pada hari Kamis, 24 Januari 2019 pukul 14.00.

pembuatan ktp gratis, syaratnya ya cuman itu saja membawa surat pengantar dari daerah asal, tapi tidak ada satupun waria yang bergerak, tidak ada yang minat sama sekali. Sampai kita bingung, waria ini maunya bagaimana, sudah dibantu, setidaknya kita memberitahu begitu soal kewajiban dia sebagai warga negara harus memiliki identitas.”

Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pimpinan kelompok waria dengan pemerintah guna mengurus KTP yang nantinya lebih lanjut dapat membuat waria dapat menggunakan hak pilihnya. Tetapi tidak ada satupun waria yang bergerak dan mengurus perubahan KTP mereka padahal mereka sudah cukup lama tinggal di Jakarta atau bahkan mereka yang belum memiliki KTP sejak awal. Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, KPU Provinsi DKI Jakarta belum pernah melakukan sosialisasi Pilkada kepada kelompok waria seperti yang diungkapkan oleh Mami Yuli<sup>11</sup>.

“Saat Pilkada DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI tidak datang ke kelompok waria baik itu tujuannya untuk melakukan sosialisasi maupun membantu kami untuk masuk ke dalam DPT”

Selain itu saat penulis mewawancarai KPU Provinsi DKI Jakarta juga mengatakan bahwa KPU Provinsi belum mendatangi

kelompok waria seperti yang diungkapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta<sup>12</sup>.

“Kami memang melakukan cukup sering sosialisasi kepada masyarakat di berbagai acara. Baik di Lapangan Banteng maupun di acara *Car Free Day* (CFD). Kami juga mengundang banyak elemen masyarakat. Mungkin waria tidak langsung kami undang didalamnya tapi melalui banyak lokasi sosialisasi yang kami lakukan itu pasti juga disaksikan oleh kelompok waria”

Peran KPU Provinsi DKI Jakarta disini sangat lah rendah. Ketika penulis menanyakan peran lain KPU Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong partisipasi politik kelompok DKI Jakarta lainnya adalah dengan cara menempel poster poster di lokasi yang dapat mudah dibaca oleh semua orang. Oleh karena ini, faktor peran pemerintah dimana dalam hal ini adalah KPU Provinsi DKI Jakarta kurang berperan dalam mendorong partisipasi politik kelompok waria.

## 2. Peranan Media Massa

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa media massa dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menyangkut sosialisasi pemilihan sudah cukup baik. Banyak iklan kreatif yang bertujuan untuk menarik partisipasi politik kelompok waria khususnya dalam hal menggunakan pilihannya.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mami Yuli, Ketua Forum Komunikasi Waria Seluruh Indonesia, pada hari Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.30.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan KPU Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jumat, 25 Januari 2019 pukul 09.00

### 3. Perilaku Paslon Cagub-Cawagub Pilkada DKI Jakarta 2017

Perilaku paslon pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menunjukkan pengaruh yang besar pada partisipasi kelompok waria. Pada tabel 3.21 menunjukkan bahwa alasan waria tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang paling dominan adalah karena alasan kurangnya paslon cagub-cawagub untuk mendekati kelompok waria yaitu sebanyak 18 responden (29%) memilih alasan ini. Alasan ini didukung oleh tabel 3.16 dimana 46 responden (74,2%) tidak pernah mengikuti atau melihat kegiatan kampanye langsung dari salah satu paslon. Beberapa responden menyebutkan bahwa memang tidak pernah ada timses apalagi calon yang datang ke daerah mereka sehingga keterikatan antara pemilih dimana disini adalah waria dengan paslon menjadi tidak ada. Pada tabel 3.17 juga menunjukkan bahwa hanya 2 responden (3,2%) yang menjadi timses salah satu paslon, 14 responden (22,6%) menjadi simpatisan, dan sisanya yaitu 46 responden (74,2%) tidak menjadi simpatisan maupun timses. Hal ini dikarenakan perilaku paslon pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dimana kelompok waria, hanya didatangi untuk keperluan kantung suara. Kepentingan itupun hanya diwakili oleh timses yang datang kepada pemimpin kelompok waria. Selanjutnya tidak ada *follow up* lebih lanjut seperti advokasi kepentingan, atau kampanye langsung kepada kelompok waria yang langsung disampaikan oleh figur paslon tersebut.

Perilaku paslon ini disebabkan oleh faktor paslon menjaga jarak interaksi dengan kelompok rentan tetapi mereka juga membutuhkan suara dari kelompok rentan tersebut. Hal ini menyebabkan proses kampanye yang dilakukan oleh paslon dan timses menjadi tidak maksimal. Kedatangan timses hanya untuk meminta dukungan, sehingga kelompok waria merasa hanya dimanfaatkan sebagai kantung suara saja tanpa ada nya kepentingan ataupun keresahan kelompok waria ini tidak tersampaikan. Tidak adanya hubungan timbal balik ini menyebabkan kelompok waria merasa bahwa perilaku paslon pada Pilkada DKI Jakarta menentukan kelompok waria untuk berpartisipasi atau tidak dalam kampanye baik sebagai timses atau simpatisan dan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

### D. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian tentang Tingkat Partisipasi Politik Kelompok Waria pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik kelompok waria pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tergolong dalam kategori partisipasi politik "penonton" dimana partisipasi politik yang paling umum dilakukan oleh kelompok waria adalah sebatas pemberian suara saja saat hari pemilihan. Penggunaan hak suara ini pun masih tergolong rendah dimana 61,3 % responden tidak menggunakan hak suaranya dan hanya 38,7 % responden yang menggunakan hak suaranya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kelompok waria di Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah faktor

internal dan faktor eksternal dimana faktor internal yang paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang akan mendorong kesadaran politik sedangkan faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah peranan pemerintah untuk melakukan sosialisasi pilkada dan melakukan pendataan pemilih waria serta perilaku dari Paslon Cagub-cawagub yang ada di Pilkada DKI Jakarta 2017 kurang memperhatikan kelompok waria.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran untuk pihak yang dapat memengaruhi partisipasi politik kelompok waria, diantaranya :

#### 1. KPU Provinsi DKI Jakarta

Melakukan sosialisasi kepada kelompok waria. Kehadiran negara dimana dalam konteks ini adalah KPU Provinsi DKI Jakarta di tengah tengah kelompok waria sangat penting untuk mendorong partisipasi politik kelompok waria. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan bantuan dari pimpinan kelompok waria agar mudah untuk mengumpulkan massa kelompok waria.

#### 2. Pemerintah DKI Jakarta

Rekomendasi untuk pemerintah DKI Jakarta yang penulis sarankan adalah terus melakukan pendataan kelompok waria dengan cara mendatangi kelompok waria lalu berusaha mendaftarkan waria tersebut agar memiliki eKTP. Walaupun hal ini pernah dilakukan oleh Pemda yang diwakili oleh Disdukcapil dan Dinas Sosial DKI Jakarta dan tidak ada waria yang datang satupun, hal ini harus terus dilakukan. Cara yang mungkin efektif adalah datang langsung ke area tempat tinggal kelompok waria sehingga waria merasa pemerintah hadir dan dengan adanya ektp sehingga adanya jaminan bahwa seorang waria

terdaftar di DPT dan meningkatkan kemungkinan menggunakan hak suaranya.

#### 3. Kelompok waria

Bagi kelompok waria, perlu adanya kemauan untuk berubah dan kemauan itu dapat berupa partisipasi politik. LSM yang memiliki *concern* lebih ke kelompok waria harus lebih banyak sehingga membuka ruang ruang untuk berpartisipasi berupa kegiatan organisasi. Kemauan untuk mengurus ektp juga sebuah keniscayaan untuk perubahan sehingga kelompok waria dapat menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi memperjuangkan kepentingan kepentingan kelompok waria itu sendiri. Pimpinan kelompok waria perlu lebih untuk memberikan pemahaman politik kepada kelompok waria sehingga nantinya muncul kesadaran secara mandiri tumbuh di dalam kelompok ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kirana, Chenia Ilma, Hery Wibowo, dan Santoso Tri Raharo. , "Proses Pelayanan Sosial Bagi Waria Mantan Pekerja Seks Komersial di Yayasan Srikandi Sejati Jakarta Timur" *Jurnal Prosiding KS Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3, No. 3. 2016.